PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI PEKERJA MIGRAN ILEGAL ASAL NDONESIA

Ni Wayan Dhyanaadhara Sandyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dhyanaadharasandyani@gmail.com
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Pekerja Migran ilegal asal Indonesia (PMI ilegal) di Malaysia menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlindungan hukum dan status kewarganegaraan anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan campuran dengan warga negara Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait status kewarganegaraan anak dari PMI ilegal dan perlindungan hukum bagi anak dari PMI ilegal tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, dan literatur terkait yang relevan dengan isu perlindungan anak dari PMI ilegal dan status kewarganegaraan anak tersebut. Status kewarganegaraan anak-anak dari perkawinan campuran ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, yang memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu. Namun, perlindungan hukum bagi anak-anak tanpa dokumen resmi ini tetap menjadi isu yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Temuan ini menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dari PMI ilegal, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

Kata Kunci: Pekerja Migran Ilegal, Status Kewarganegaraan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Perlindungan

ABSTRACT

Illegal migrant workers from Indonesia (illegal PMI) in Malaysia face various challenges, including legal protection and the citizenship status of their children born from mixed marriages with Malaysian citizens. This research aims to provide an understanding of the citizenship status of children of illegal PMIs and the legal protection for these children based on Indonesian positive law. This study is a normative juridical research using a qualitative approach. Document analysis was conducted by examining legislation and relevant literature related to the protection of children from illegal PMIs and the citizenship status of those children. The citizenship status of children from mixed marriages is regulated by Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship, which grants the right to dual citizenship to children until a certain age. However, legal protection for children without official documents remains a serious issue that needs to be addressed by the government. The findings highlight the importance of cooperation between the Indonesian and Malaysian governments in creating a safe environment for children of illegal PMIs and ensuring that their rights are well protected.

Key Words: Illegal Migrant Workers, Citizenship Status, Indonesian Embassy, Protection

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2023, sekitar 3 juta jiwa yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memilih Malaysia sebagai tempat untuk bekerja.¹ Keputusan mencari pekerjaan di luar negeri sering kali didorong oleh faktor ekonomi, seperti perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan kesempatan kerja dibandingkan dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan pengangguran dan kemiskinan.² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sekitar 2 juta jiwa dalam beberapa tahun terakhir.³ Namun, berbeda dengan Malaysia, dimana negara tetangga ini telah berhasil keluar dari krisis ekonomi dan berkembang menjadi negara industri baru yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur pelindungan pekerja migran, implementasi dan penegakan hukumnya masih menjadi tantangan besar. Dengan dikeluarkannya UU PPMI oleh Pemerintah Indonesia, maka peraturan ini dapat digunakan sebagai payung hukum yang menetapkan hak-hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas informasi, perlindungan hukum, dan kesejahteraan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga menjadi landasan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran melalui berbagai regulasi, muncul isu lain seperti masalah perkawinan antara PMI dengan warga negara Malaysia yang mengakibatkan kewarganegaraan anak-anak dari perkawinan campuran ini memiliki ketidakpastian status hukum.

Masalah status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran telah menjadi permasalahan yang semakin mendesak di Asia Tenggara, terutama dalam konteks PMI ilegal (*undocumented*) di Malaysia. Anak yang lahir dari PMI ilegal di Malaysia tidak memperoleh dokumen resmi kependudukan dikarenakan tidak didaftarkannya status anak tersebut oleh orang tuanya. Ketiadaan dokumen tersebut menyebabkan sang anak tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan, perawatan medis, dan perlindungan hukum. Kategori PMI ilegal ini juga telah ditetapkan di dalam konstitusi Malaysia, yaitu *seksyen 6 Akta Imigresen 1959/63* (Akta 155) yang membatasi hak-hak PMI ilegal di negara tersebut.⁵ Selain itu, pihak Imigrasi Malaysia menetapkan bahwa pekerja asing yang memiliki Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) dilarang untuk menikah

¹ Aulia, Marzuqoh dan Azizah, Nur. "Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022-2023." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, No. 1 (2024): 109

² Effendi, Tommy dan Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia." *Jurnal Masalah Pengabdian Masyarakat* 5, No. 1 (2024): 20

³ Suradji. "Penanganan Pekerja Migran di Malaysia." *Jurnal Ilmu Administrasi*, (2019): 224

⁴ *Ibid.*

⁵ *Seksyen 6 Akta Imigresen 1959/63*

dengan warga lokal atau pekerja asing lainnya yang bekerja di Malaysia.⁶ Oleh karena itu, bagi WNI yang menikah dengan WNA di Malaysia, salah satu pemohon harus mempunyai izin tinggal (visa pelajar/visa kerja profesional) dan bukan pemegang PLKS dengan memenuhi beberapa persyaratan lainnya.⁷ Dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia dan implikasi kewarganegaraan anak-anak dari perkawinan campuran, maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (*Indonesian Embassy*) di Kuala Lumpur memiliki peran yang penting untuk proses penyelesaian berbagai masalah tersebut.

Penelitian ini penting untuk mengetahui perlindungan hukum yang ada bagi PMI yang berada di Malaysia, mengingat banyaknya jumlah PMI yang berada di negara tersebut. Selain itu, permasalahan lainnya adalah anak-anak hasil perkawinan campuran seringkali menghadapi ketidakpastian status kewarganegaraan, yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Dengan memahami isu ini secara mendalam, jurnal ini dapat memberikan informasi yang berfokus pada penyelesaian masalah perlindungan hak anak dari PMI *undocumented* dan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam status tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak sebagai WNI.

Jurnal ini telah menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan landasan teori dan konteks yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak dari PMI ilegal di Malaysia serta status kewarganegaraan mereka. Studi mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak dari PMI di Malaysia terdapat pada tulisan yang berjudul "Model Perlindungan Anak-anak Pekerja Migran di Malaysia." Tulisan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar problematika yang dihadapi oleh anak dari PMI di Malaysia disebabkan oleh kurangnya dokumen, seperti akta kelahiran dan paspor. Selain itu, masalah Pendidikan juga menjadi isu yang banyak terjadi, karena beberapa anak PMI di Malaysia tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga jenjang SMA maupun perguruan tinggi.⁸

Studi lainnya adalah penelitian yang berjudul "Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia *Undocumented* yang Lahir di Malaysia." Penelitian tersebut menguraikan tentang tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak PMI yang berada di Malaysia tanpa dokumen resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak kewarganegaraan bagi warganya merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara. Dalam

⁶ Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

⁷ KBRI Kuala Lumpur. "Penerbitan Surat Keterangan Untuk Menikah di Malaysia." Diakses pada 15 September 2024 dari https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/pages/penerbitan_surat_keterangan_untuk_menikah_di_malaysia/83/about-service

⁸ Wulan, Tyas Retno dkk. "Model Perlindungan Anak-anak Pekerja Migran di Malaysia." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*, (2022): 475

hal status kewarganegaraan anak-anak dari PMI *undocumented*, maka negara harus membantu dalam mengembalikan hak-hak dari anak-anak tersebut agar dapat memiliki hak yang setara dalam kelangsungan hidup, pendidikan, seperti anak-anak WNI lainnya.⁹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga, namun terdapat *gap* yang signifikan dalam literatur yang ada. Dalam beberapa literatur tersebut, pembahasan lebih berfokus pada aspek hukum kewarganegaraan dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran, tanpa memberikan panduan praktis tentang proses pemulangan anak-anak tersebut ke Indonesia. *Gap* ini menjadi penting untuk diisi, mengingat banyaknya kasus anak-anak yang terjebak dalam posisi *stateless* dikarenakan status *undocumented* dari orang tua mereka. Tujuan penulisan Jurnal ini adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang semua tindakan yang diperlukan dalam proses pemulangan anak-anak tersebut, seperti prosedur administrasi yang harus diikuti. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya untuk melindungi dan mengembalikan anak-anak PMI ke negara asalnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status Kewarganegaraan anak dari Pekerja Migran Ilegal asal Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dari Pekerja Migran Ilegal asal Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan jurnal ini didasari dari adanya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Berlandaskan hal tersebut, maka jurnal ini disusun dengan tujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan memberikan pemahaman terkait status kewarganegaraan anak dari Pekerja Migran ilegal asal Indonesia dan perlindungan hukum bagi anak dari Pekerja Migran ilegal asal Indonesia tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengadopsi pendekatan kualitatif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, yaitu Perundang-Undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisa terhadap peraturan Perundang-Undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain menggunakan sumber bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, termasuk literatur akademis dan artikel jurnal. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang

⁹ Santoso, Debrita Yanieta. "Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia *Undocumented* yang Lahir di Malaysia." *Jurist-Diction* 5, No. 1 (2022): 105

relevan.¹⁰ Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai norma-norma hukum dan konteks sosial yang mempengaruhi perlindungan terhadap PMI serta implikasi kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan signifikan mengenai efektivitas perlindungan hukum dan dampaknya terhadap status kewarganegaraan anak-anak dari PMI.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Kewarganegaraan Anak dari Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia

3.1.1 Komparasi Hukum Indonesia dan Malaysia

Perbandingan hukum antar negara merupakan suatu pendekatan penting untuk memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam konteks kewarganegaraan anak-anak dari PMI illegal. Tidak dimilikinya dokumen resmi yang diperlukan untuk mendaftarkan kewarganegaraan, maka anak yang lahir dari PMI illegal di Malaysia beresiko menjadi tidak diakui sebagai warganegara manapun secara hukum.¹¹ Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak antara Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan.¹² Konstitusi Indonesia yang menentukan status kewarganegaraan diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara itu, status kewarganegaraan di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Malaysia (*Akta A1198/2003*).¹³

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi antara PMI ilegal dengan warga negara Malaysia akan menyebabkan anak mereka memiliki status kewarganegaraan ganda. Hal ini disebabkan karena penentuan salah satu status kewarganegaraan anak baru bisa dilakukan setelah sang anak berusia 18 tahun. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006, seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraannya ketika dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Meskipun ayah dari anak tersebut berasal dari negara penganut asas *ius sanguinis* seperti Malaysia, namun sang anak tetap akan dianggap sebagai WNI jika ibunya juga adalah seorang WNI sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. Selain UU No. 12 Tahun 2006, Indonesia juga mengatur tentang kewarganegaraan anak bilamana terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa jika terjadinya suatu perceraian, dimana sang ibu adalah WNI dan sang anak belum dapat menetapkan pilihan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan status

¹⁰ Fajar, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

¹¹ Santoso, Debrita Yanieta, *Op.Cit.*, 77

¹² Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, No. 2 (2013): 612

¹³ *Akta A1198/2003*

kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak tersebut.¹⁴ Kedua peraturan tersebut memberikan pemahaman bahwa konstitusi di Indonesia tetap akan melindungi hak-hak wargenagaranya, terutama dalam hal ini terkait dengan penetapan status kewarganegaraan bagi WNI.

Malaysia merupakan negara yang tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda, melainkan negara yang menganut sistem pewarisan dari garis status sang ayah (*ius sanguinis*).¹⁵ Status Kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran menurut hukum di Malaysia terdapat dalam *Perkara 15 Akta A1198/2003*. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa anak berusia di bawah 21 tahun akan didaftarkan sebagai warga negara Malaysia oleh walinya kepada pemerintah Malaysia dengan syarat salah satu orang tua dari anak tersebut merupakan warga negara Malaysia.¹⁶ Selain *Akta A1198/2003*, terdapat pula *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)* yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak-anak di Malaysia.¹⁷ Terkait dengan status anak dari PMI ilegal yang tidak diakui orang tuanya yang merupakan warga negara Malaysia, akan sulit bagi anak tersebut untuk mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia karena tidak ada dokumen yang menunjukkan status mereka. Hal ini akan berpotensi menyebabkan sang anak menjadi *stateless*.

Peraturan dari masing-masing negara, yakni Indonesia dan Malaysia, dapat ditemui adanya persamaan sekaligus perbedaan dalam hal pemberian status anak berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Peraturan di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 akan memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi anak PMI ilegal sebelum berumur 18 tahun. Sementara, peraturan di Malaysia yang terdapat dalam *Perkara 15 Akta A1198/2003* akan memberikan status kewarganegaraan pada anak PMI ilegal di bawah usia 21 tahun yang salah satu orang tuanya merupakan warganegara Malaysia. Namun, dalam pendaftaran kewarganegaraan Malaysia tersebut, penting untuk diakuinya sang anak oleh orang tuanya yang merupakan warga negara Malaysia. Dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mengakui kewarganegaraan ganda anak sebelum berusia 18 tahun, maka menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya *stateless* atau tidak diakuinya status seseorang sebagai warga negara manapun berdasarkan hukum.

3.1.2 Anak dari Perkawinan PMI Ilegal dengan Warga Negara Malaysia

Perkawinan yang terjadi antara warga negara Malaysia dengan PMI ilegal merupakan permasalahan yang banyak terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan ini, seperti faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berinteraksi. Perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki kewarganegaraan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁵ Syafrizal. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran antar Negara WNI dengan WNA Terhadap Status Personal Anak." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 17, No. 3 (2023): 1077-1078

¹⁶ Perlembagaan Persekutuan, Akta A1198/2003

¹⁷ *Akta Kanak-Kanak 2001*

yang sama dan salah satunya adalah warga negara Indonesia didefinisikan sebagai perkawinan campuran Menurut Pasal 57 UU Perkawinan.¹⁸ Terdapat cukup banyak PMI illegal di Malaysia, khususnya wanita yang melakukan pernikahan dengan warga negara Malaysia.¹⁹ Hal ini dipicu oleh alasan mencari jaminan hidup yang lebih baik dan stabilitas ekonomi yang sering kali tidak dapat mereka peroleh di tanah air.²⁰ Terdapat ketentuan dari pihak Imigrasi Malaysia yang melarang adanya pernikahan antara pekerja asing dengan PLKS dan warga negara Malaysia.²¹ Meskipun pemerintah melarang pekerja migran untuk menikah selama masa kerja mereka, banyak dari mereka yang tetap melakukannya secara tidak resmi atau "nikah siri". Hal ini sering kali mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan hak-hak anak hasil perkawinan tersebut.²²

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menikah dengan warga negara Malaysia menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks, baik dari sisi hukum Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia, pernikahan PMI di luar negeri harus dicatatkan di instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta nikah yang sah. Kementerian Luar Negeri RI melalui program Menikah untuk Melindungi (Menikum) telah berupaya untuk memfasilitasi pencatatan pernikahan bagi WNI di luar negeri. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi jumlah pernikahan siri dan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut, sehingga mereka mendapatkan hak-hak dasarnya seperti pendidikan dan waris.²³

Aturan hukum mengenai pernikahan bagi pekerja migran di Malaysia cukup ketat. Pemerintah Malaysia umumnya melarang pekerja asing dengan *temporary pass* (PLKS) untuk menikah dan memiliki anak selama mereka bekerja di negara tersebut.²⁴ Namun, jika pernikahan dilakukan secara sah, pasangan WNI harus mendaftarkan pernikahan mereka ke *Mahkamah Syariah* untuk mendapatkan pengesahan resmi. Pendaftaran pernikahan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan status pernikahan tersebut dapat dipertanyakan ketika anak mereka lahir, sehingga akta kelahiran tidak dapat dikeluarkan jika mereka dianggap sebagai anak di luar nikah. Pendaftaran di *Mahkamah Syariah* juga memberikan hak-hak hukum kepada istri WNI di bawah

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁹ Padmavati, Alyah., Nugroho, Yuli Agung., dan Rokhim, Muhammad Nur. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial* 1, No. 4 (2023): 2890-290.

²⁰ Burnahi, Ruslan. "Setiap Hari Satu Warga Malaysia Nikahi WNI." (2010). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.antaraneews.com/berita/182917/setiap-hari-satu-warga-malaysia-nikahi-wni>

²¹ Jabatan Imigresen Malaysia, *Op.Cit.*

²² Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Press Indo, 1989), 35.

²³ Anwar, Ridwan. "Beri Perlindungan Hukum Bagi WNI, MA Laksanakan Sidang Penetapan Nikah di Sabah Malaysia." (2018). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/beri-perlindungan-hukum-bagi-wni-ma-laksanakan-sidang-penetapan-nikah-di-sabah-malaysia>

²⁴ Memorandum Saling Pengertian, *Loc.Cit.*

hukum Malaysia, termasuk akses terhadap dokumen resmi dan kemungkinan untuk mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap setelah beberapa tahun tinggal di negara tersebut.

Dalam kasus terjadinya perkawinan antara PMI ilegal dan warga negara Malaysia yang kemudian melahirkan seorang anak, maka terdapat banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anak dari PMI ilegal dan warga negara Malaysia tersebut memiliki status yang sah. Menurut Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak-anak dari WNI yang dilahirkan di Malaysia harus didaftarkan sebagai WNI. Negara Malaysia menganut prinsip *ius sanguinis*, dimana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan.²⁵ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan RI, anak yang terlahir dari pernikahan antara PMI ilegal dan warga negara Malaysia akan menyandang status *dwi kewarganegaraan* sampai berusia 18 tahun. Maka dari itu, PMI ilegal yang menikah dengan warga negara Malaysia perlu memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar agar pernikahan mereka diakui oleh kedua negara dan mendapatkan perlindungan hukum bagi anak-anaknya di masa depan.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia

3.2.1 Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur

Sebelum kemerdekaannya, Indonesia telah menjalin relasi internasional dengan banyak negara di dunia. Adanya kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks, serta untuk menjaga persatuan dunia, maka kerja sama internasional pun menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga. Dalam perkembangannya, hubungan-hubungan diplomatik terjalin antar negara, yang kemudian menjadi kebiasaan internasional. Pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut dituangkan dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961 yang mengatur mengenai hubungan diplomatik. Tidak lama setelahnya kemudian dikeluarkan *Vienna Convention on Consular Relations*, 1963 yang mengatur mengenai hubungan konsuler.

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003, perwakilan Indonesia di luar negeri terdiri dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler.²⁶ Perwakilan Diplomatik terdiri dari KBRI dan Perutusan Tetap RI. Sementara itu, Perwakilan Konsuler terdiri dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia. Perwakilan Diplomatik memiliki tugas utama sebagai wakil Indonesia dalam menjalankan hubungan diplomatik serta melindungi kepentingan negara dan warganya di negara penerima.²⁷ Setiap negara penerima atau organisasi internasional, pada umumnya akan terdapat Duta Besar Luar Biasa yang diangkat oleh

²⁵ Harahap, Siti dan Nurhilmiyah. "Status Kewarganegaraan Pelajar Keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, Malaysia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 3 (2024): 1787

²⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003

²⁷ *Ibid.*

Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI, serta berfungsi sebagai wakil pribadi Presiden RI.²⁸ Dalam menjalankan tanggung jawabnya di suatu Negara Penerima, seorang Duta Besar Luar Biasa bertugas di KBRI yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri republik indonesia. Duta Besar ini juga didukung oleh Pejabat Diplomatik, Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu, serta oleh Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik.²⁹

KBRI KL memiliki beberapa bidang, dimana pada setiap bidangnya disertai dengan fungsi dan tugas utamanya masing-masing. Bidang tersebut dibagi menjadi Fungsi dan Atase. Fungsi sendiri adalah bidang yang berada di bawah langsung dari Kemenlu RI, yang terdiri dari Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi, Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya, Fungsi Protokol dan Konsuler, Fungsi Komunikasi, serta Fungsi Administrasi. Sementara itu, Atase merupakan bidang di bawah naungan Kementerian/Lembaga terkait. Terdapat 8 (delapan) atase di KBRI KL, yaitu Atase Pertahanan, Atase Imigrasi, Atase Perdagangan, Atase Perhubungan, Atase Ketenagakerjaan, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Kepolisian, serta Atase Hukum.³⁰

Pada tahun 2023, Malaysia menjadi negara dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) terbanyak di luar negeri, diperkirakan lebih dari 3 juta orang.³¹ Dengan angka yang cukup tinggi tersebut, seringkali terjadi berbagai permasalahan yang dialami oleh WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia. Berbagai permasalahan yang terjadi begitu beragam, seperti PMI yang masuk secara ilegal, WNI *overstay* tanpa pengurusan dokumen yang menyebabkan harus membayar denda, Paspor yang hilang, hingga pernikahan tidak resmi dengan warga negara Malaysia yang menghasilkan keturunan. KBRI KL menempati posisi yang penting dalam melayani dan memberi perlindungan bagi WNI yang mengalami permasalahan ketika berada di Malaysia. Salah satu bidang pada KBRI KL yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah Fungsi Konsuler. Bidang pelayanan pada Fungsi Konsuler menangani berbagai laporan dari WNI/PMI yang memiliki permasalahan di Malaysia. Berbagai pelayanan yang diberikan seperti, penerbitan dan legalisasi dokumen, pengurusan jenazah, permohonan surat keterangan status kewarganegaraan Indonesia (SKSKI), pendaftaran kelahiran anak dari WNI di Malaysia, serta pemberian informasi terkait hal-hal yang diperlukan WNI/PMI ketika menghadapi suatu permasalahan.³² Sementara itu, bidang perlindungan memiliki tugas untuk memberikan perlindungan bagi WNI/PMI yang sedang berada di Malaysia. Adapun

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Pelayana Perwakilan Konsuler." Diakses pada 15 September 2024 dari <https://www.kemlu.go.id/kualalumpur>

³¹ Aulia, Marzuqoh dan Azizah, Nur, *Op.Cit.*, 109

³² KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. *Loc.Cit.*

beberapa kegiatannya, seperti pengajuan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), pendampingan *medical check-up* WNI/PMI sakit, serta proses pemulangan WNI/PMI dari *shelter* KBRI KL maupun Depot Tahanan Imigrasi Malaysia ke Indonesia.³³ Maka dari itu, Fungsi Konsuler memegang peran penting terhadap berbagai permasalahan WNI ketika sedang berada di luar negeri.

3.2.2 Proses Pemulangan Anak Dari PMI Ilegal ke Indonesia

Pernikahan antara PMI ilegal dan warga negara Malaysia merupakan suatu permasalahan yang kompleks, terutama ketika anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Terdapat beberapa kasus dimana pernikahan tersebut dilakukan secara informal atau tidak terdaftar, sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan ini tidak mendapatkan akta kelahiran. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam status hukum yang tidak jelas, yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Menurut Hermono (Duta Besar Indonesia di Malaysia), bahwa perlindungan yang seharusnya diberi negara pada WNI di Malaysia tidak hanya diberikan kepada pelaku imigran/orang tua tersebut, namun perlindungan yang diberikan oleh negara juga harus melindungi anak-anak imigran yang dilahirkan di Malaysia.³⁴ Anak dari para imigran tidak memiliki akses kehidupan yang layak, tidak mendapatkan hak untuk berkehidupan yang bebas, dan juga anak-anak tersebut tidak dapat mengenyam Pendidikan yang baik.³⁵

Permasalahan lain yang akan terjadi, yaitu ketika anak-anak hasil pernikahan campuran antara PMI yang memiliki status ilegal dengan warga negara Malaysia ini ingin dipulangkan ke Indonesia. Anak-anak tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang mengakui status kewarganegaraan mereka, seperti akta kelahiran atau dokumen identitas lainnya dikarenakan sang ibu merupakan PMI ilegal. Oleh karena itu, akan terjadi ketidakjelasan status hukum yang dapat menghambat proses pemulangan. Proses ini bisa menjadi lebih sulit jika pernikahan antara orang tua tidak terdaftar secara resmi, sehingga akan terjadi kendala dalam membuktikan hubungan keluarga dan hak-hak anak. Maka dari itu, penting untuk merumuskan langkah-langkah yang jelas dan efektif dalam menangani pemulangan anak-anak dari PMI ilegal tersebut.

KBRI Kuala Lumpur, memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan di Malaysia. Dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan adanya pendaftaran kelahiran anak dari WNI di Malaysia.³⁶ Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan KBRI Malaysia terkait dengan proses pemulangan anak-anak dari PMI ilegal

³³ *Ibid.*

³⁴ Indresvari, Mawardha dan Budiono, Arief. "Kebijakan KBRI Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia." *UMS Librari*, (2024): 2

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

tersebut. Anak-anak yang tidak memiliki dokumen berupa paspor tetapi terindikasi sebagai WNI dapat diterbitkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia (SKSKI).³⁷ Dengan penerbitan SKSKI tersebut, maka proses selanjutnya yaitu mengajukan penerbitan paspor atau surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebagai persyaratan pulang ke Indonesia secara legal. Adapun urutan proses mulai dari pengajuan SKSKI sampai penerbitan SPLP yang dikeluarkan KBRI KL adalah sebagai berikut:³⁸

NO	TAHAPAN	KETERANGAN
1	Persiapan Dokumen	Tahap pertama, yaitu melengkapi dokumen yang terdiri: 1) Salinan paspor atau SPLP dari Ibu Kandung dan Ayah Kandung (jika ada). 2) Sijil Lahir yang diterbitkan Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia (JPN), baik yang telah dilegalisasi Kementerian Luar Negeri Malaysia maupun yang tidak, atau Surat Akuan Sumpah Pesuruh Jaya Sumpah. 3) Untuk warga negara Malaysia, menyertai surat keterangan dari kepala kampung setempat, surat keterangan dari rumah sakit atau klinik, dan pernyataan atau keterangan dari dua saksi 4) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani dan dicap jempol oleh ibu kandung.
2	Pengajuan Temu <i>Online</i>	Pemohon mengajukan permohonan temu secara <i>online</i> di website kbrikl.id dengan memilih SPLP bagi WNI tanpa salinan paspor/dokumen.
3	Loket Hukum	Ibu kandung dan anak wajib datang sesuai dengan hari yang ditentukan ke loket 22 bagian pelayanan hukum untuk dilakukannya pemeriksaan kelengkapan dokumen, wawancara, input data, serta penerbitan SKSKI.
4	Loket Konsuler	Tahap selanjutnya, pemohon akan diarahkan ke pelayanan konsuler (loket 1 dan 2) untuk pemeriksaan SKSKI, input data, penerbitan surat bukti pencatatan kelahiran (SBPK), serta

³⁷ Aulia, Marzuqoh dan Azizah, Nur, *Op.Cit.*, 113

³⁸ KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, *Loc.Cit*

		penerbitan nomor antrian SPLP untuk di Loket Imigrasi.
5	Loket Imigrasi	Selanjutnya, pemohon akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian untuk proses penerbitan SPLP.

Permasalahan yang terjadi akibat perkawinan antara PMI ilegal dengan warga negara Malaysia yang dapat berdampak pada anak-anaknya sangat perlu untuk disadari. Hal ini berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, anak-anak dapat terjebak dalam situasi hukum yang rumit dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka.

IV. Kesimpulan

Status kewarganegaraan anak dari Pekerja Migran Ilegal (PMI) asal Indonesia di Malaysia menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan hukum kewarganegaraan di kedua negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, anak hasil perkawinan campuran antara Pekerja Migran Ilegal dan Warga Negara Malaysia berhak memperoleh *dwi kewarganegaraan* hingga berusia 18 tahun. Namun, dalam banyak kasus, status kewarganegaraan anak menjadi tidak jelas akibat kurangnya pencatatan resmi, yang dapat berdampak pada hak-hak mereka di kemudian hari. Dalam konteks perlindungan hukum, KBRI Kuala Lumpur (KBRI KL) memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak dari anak Pekerja Migran Ilegal asal Indonesia ini tetap terlindungi. Selain memberikan informasi dan bantuan konsuler, KBRI juga menangani berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak-anak tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah proses pemulangan anak ke Indonesia, dengan persyaratan dipenuhinya dokumen resmi seperti Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia (SKSK), Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dengan adanya dukungan hukum yang jelas serta keterlibatan aktif KBRI dalam melindungi hak-hak anak Pekerja Migran Ilegal asal Indonesia, diharapkan mereka dapat tumbuh dengan status kewarganegaraan yang pasti, serta memperoleh akses terhadap pendidikan dan layanan sosial yang diperlukan untuk masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Press Indo, 1989)

Internet

- Anwar, Ridwan. "Beri Perlindungan Hukum Bagi WNI, MA Laksanakan Sidang Penetapan Nikah di Sabah Malaysia." (2018). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/beri-perlindungan-hukum-bagi-wni-ma-laksanakan-sidang-penetapan-nikah-di-sabah-malaysia>

- Burnahi, Ruslan. "Setiap Hari Satu Warga Malaysia Nikahi WNI." (2010). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.antaranews.com/berita/182917/setiap-hari-satu-warga-malaysia-nikahi-wni>
- KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Pelayana Perwakilan Konsuler." Diakses pada 15 September 2024 dari <https://www.kemlu.go.id/kualalumpur>
- KBRI Kuala Lumpur. "Penerbitan Surat Keterangan Untuk Menikah di Malaysia." Diakses pada 15 September 2024 dari https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/pages/penerbitan_surat_keterangan_untuk_menikah_di_malaysia/83/about-service

Jurnal

- Aulia, Marzuqoh dan Azizah, Nur. "Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022-2023." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, No. 1 (2024)
- Effendi, Tommy dan Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia." *Jurnal Masalah Pengabdian Masyarakat* 5, No. 1 (2024): 20
- Harahap, Siti dan Nurhilmiah. "Status Kewarganegaraan Pelajar Keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, Malaysia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 3 (2024)
- Indresvari, Mawardha dan Budiono, Arief. "Kebijakan KBRI Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia." *UMS Librari*, (2024)
- Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, No. 2 (2013)
- Padmavati, Alyah., Nugroho, Yuli Agung., dan Rokhim, Muhammad Nur. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, Malaysia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial* 1, No. 4 (2023): 2890-290.
- Suradji. "Penanganan Pekerja Migran di Malaysia." *Jurnal Ilmu Administrasi*, (2019)
- Santoso, Debrita Yanieta. "Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia *Undocumented* yang Lahir di Malaysia." *Jurist-Diction* 5, No. 1 (2022)
- Syafrizal. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran antar Negara WNI dengan WNA Terhadap Status Personal Anak." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 17, No. 3 (2023)
- Wulan, Tyas Retno. "Model Perlindungan Anak-anak Pekerja Migran di Malaysia." *Konferensi Nasional Sosiologi IX AOSSI 2022*, (2022)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Vienna Convention on Consular Relations 1963

Akta Imigresen 1959/63 (*Act* 155)

Akta Kanak-kanak 2001

Akta A1198/2003

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Malaysia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sektor Domestik di Malaysia